

Volume: 10 Nomor: 2 Tahun 2023

[Pp. 54-62]

PEREMPUAN, KEBIJAKAN DAN RUANG PUBLIK: PENGALAMAN DI JANGKANG 1, KUBU RAYA

Ambaryani & Dita Melina

Email: ambaryani276@gmail.com

Magister FISIP Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to discuss about women, their policies and position in the public sphere. In general, women in Indonesia are lagging behind. They are not involved in policy making because they are placed backstage. Public spaces are usually filled by men. However, what is obtained by Jangkang I, Kubu Raya shows the opposite. Based on interviews with a number of PKK members, and observations of village activities in 2019, it was found that women in Jangkang I had a dominant role in making decisions and playing a role in the public space of the village community. Jangkang I woman once held the position of leader (village head). Through the Family Welfare Empowerment (PKK) activities women also get media for organizations that make them continue to play a role in public affairs and represent the village in several activities in the Kubu sub-district and the Kubu Raya district. They were the ones who helped determine village policies and appeared in public to carry out these policies. The experience in Jangkang I, Kubu Raya, West Kalimantan, can be an inspiration for women in other regions, and a source of study to see the other side of gender issues in Indonesia.

Keywords: *Women, Public Policy, Public Spaces, Kubu Raya*

PENDAHULUAN

Dalam studi kebijakan publik sekarang ini, perempuan sering dianggap tidak memiliki peran. Jika pun mereka berperan, peran mereka tidak dianggap penting atau bahkan diabaikan sama sekali, karena hanya peran di belakang layar. Peran di belakang layar tidak dianggap penting, walaupun sebenarnya penting sebagai pendukung kegiatan publik, karena tidak terlihat dan biasanya tidak disebutkan.

Selama ini di Indonesia, perempuan memang identik dengan peran subordinat. Perannya sebagai pendamping lelaki (suami), dan sebagai supporting untuk kegiatan-kegiatan publik. Watie, E. D. S. (2016); Fadilah, S. (2018).

Kesadaran mengenai kurang pentingnya peran perempuan mendorong kampanye emansipasi wanita. Kartini dianggap sebagai pelopor gerakan itu di negeri ini. Surat-surat yang dikirimnya kepada temannya Ny. Abendanon di Belanda telah menjadi tonggak untuk perjuangan perempuan mendapatkan tempat yang di ruang sosial khususnya pendidikan. (Kusdiana, A. 2011; Mustikawati, C., 2013; Amar, S., 2017). Kelak melalui pendidikan, kaum perempuan berkesempatan untuk belajar seperti juga kesempatan yang diberikan kepada lelaki.

Perjuangan perempuan Indonesia mewujudkan kesetaraan gender melalui kampanye emansipasi wanita kemudian memberikan ruang khusus pada perempuan dalam kebijakan publik. Dewi Sartika, adalah salah satu nama yang sering disebut sebagai pelopor selanjutnya yang memperjuangkan hak-hak publik perempuan. Gerakannya, Organisasi Keutamaan Isteri yang kemudian mendirikan sekolah keutamaan perempuan. Gerakan ini lebih terorganisir dilakukan untuk membela atau menyuarakan kepentingan perempuan pada masa itu. Respon kaum perempuan cukup tinggi. Sejumlah cabang sekolah didirikan.

Pendidikan bagi perempuan terus berkembang. Sejalan dengan hal itu perempuan mendapat ruang publik. Bukan saja dari dan oleh kalangan perempuan, tetapi juga dari pemerintah Indonesia sesudah kemerdekaan.

Buah dari gerakan-gerakan ini, telah dibentuk kementerian khusus untuk mengurus perempuan, yaitu Menteri Peranan Wanita, yang sekarang menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Selain itu, muncul juga kebijakan pemerintah yang menetapkan kuota perempuan di jajaran partai politik sebesar 30 %, sehingga perempuan tetap memiliki wakil mereka di pentas publik.

Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan contoh dan sekaligus hasil perjuangan perempuan di ruang publik. Namun, harus diakui bahwa perjuangan ini tidak sepenuhnya berhasil seperti yang diharapkan. Secara umum, perempuan tetap saja kurang berperan di tengah masyarakat. Bahkan, hingga hari ini. Batas-batas yang terkesan diskriminatif dan bias gender masih dijumpai. Anggapan yang meremehkan kemampuan perempuan masih terdengar dan dirasakan.

Misalnya, ada kritik dan sinisme mengenai perempuan yang dipaksakan muncul di ruang publik karena mereka berasal dari dinasti yang berkuasa. Perempuan jenis ini mewarisi kekuasaan dan kekuatan orang tua dan atau suaminya. Ada juga keluhan mengenai perempuan yang dieksploitasi oleh iklan dan media, yang tetap terdengar kencang menusuk telinga.

Kusumayanti (2019:125) menyebutkan perempuan masih dalam posisi yang dilematis. “Satu sisi kaum perempuan dapat bekerja leluasa di ruang publik, tapi di sisi yang lain mereka juga menerima dampak tafsir patriarki yang sejatinya tetap menjadi manusia subordinatif di mata laki-laki”.

Perempuan, terutama perempuan desa-tidak terpelajar, tetap dianggap sebagai pelengkap kehidupan lelaki. Mereka tetap dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari dapur, sumur dan kasur. Dapur bermakna mereka mengurus soal penyediaan makanan, sumur menunjukkan mereka sebagai pencuci atau pembersih pakaian, dan kasur menunjukkan mereka sebagai pemuas atau pelayan kebutuhan seksual lelaki.

Apa yang terlihat di Jangkang I, Kubu Raya, Kalimantan Barat, sepintas lalu berbeda dengan anggapan itu. Setidaknya, dari pengamatan awal memperlihatkan perempuan di sini sangat dominan dibandingkan lelaki; bukan saja di sektor domestik yang merupakan wilayah tradisional mereka, tetapi, wilayah publik. Tulisan ini berupaya menelusuri peran perempuan di sini dalam pengambilan keputusan dan sektor publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode Penelitian Kualitatif lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Peneliti menggunakan teknik analisis mendalam (in-depth analysis), dengan mengkaji masalah secara kasuistik di Jangkang I,

Kubu Raya, dengan kesadaran bahwa apa yang terjadi di sini berbeda dibandingkan dengan yang terjadi di daerah lain.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Peneliti mendeskripsikan apa yang diperoleh di lapangan, baik melalui wawancara maupun observasi, sesuai dengan apa adanya.

Data dalam penelitian ini diperoleh di Jangkang 1, Kubu Raya. Desa ini lebih kurang berjarak 50 KM dari Pontianak, ke arah tenggara. Meskipun dekat, tetapi jalan dan transportasi ke sana terbatas hanya sepeda motor. Penyeberangan rakyat di Sungai Bulan – Jangkang 1 menyebabkan terbatasnya akses jalan darat untuk kendaraan roda empat dan lebih.

Desa ini adalah desa maju yang dibangun sejak 25 Januari 1983. Desa ini bagian dari desa transmigrasi orang Jawa dari daerah Jawa Tengah, dalam masa gelombang besar transmigrasi di Indonesia. Sebagai desa baru, perkembangan di wilayah desa ini dapat dikatakan luar biasa, terutama dibandingkan dengan desa-desa lama di sekitarnya. Tata ruang yang rapi, lingkungan yang asri, serta pemanfaatan lahan kosong untuk pertanian. Jangkang I termasuk sentra produksi pertanian Kubu Raya, terutama suplai pasar untuk ubi jalar, jagung manis, dan jengkol. Jangkang I juga penyuplai kambing.

Justru itu, dengan latar belakang Jawa yang *njawa*, Jangkang 1 ini memperlihatkan data yang menarik. Di tahun 1993 Jangkang 1 dipimpin oleh kepala desa perempuan, bernama Parmi. Selama satu periode Parmi berhasil meletakkan dasar-dasar kehidupan maju perempuan Jawa.

Kehadiran Parmi dalam masyarakat Jawa tentu saja unik. Sebagai orang Jawa, lingkungan dan tradisi mereka identik dengan konsep perempuan yang menerima (*nrimo*) dan semua urusan publik diserahkan kepada lelaki. Perempuan Jawa dibentuk dengan falsafah: *sumur, dapur, dan kasur*. Tiga urusan ini, semua itu adalah termasuk dalam urusan sektor domestik untuk kepentingan suami dan anak, atau lelaki.

Data diperoleh sepanjang periode Januari-Desember 2019 melalui observasi dan wawancara mendalam. Peneliti mendapatkan kesempatan itu ketika menjadi pendamping untuk beberapa program lomba desa. Pada lomba itu desa Jangkang merupakan utusan kecamatan untuk bersaing pada tingkat kabupaten, dan kemudian menjadi juara 2 dan bersaing untuk tingkat provinsi. Pada level lomba PKK KKBPK-Kesehatan tahun 2019 Jangkang 1 juga menjadi wakil Kecamatan Kubu pada tingkat Kabupaten Kubu Raya, dan mendapatkan predikat juara umum. Juara keseluruhan kategori, yaitu penilaian Posyandu, Pola Hidup Bersih dan Sehat, Kesehatan Lingkungan dan Pemanfaatan Pekarangan.

KEBIJAKAN PUBLIK DAN PEREMPUAN

Kebijakan publik dapat diartikan sebagai regulasi, aturan yang digulirkan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat. Menurut Edward dalam (Solahudin, 2010: 4) kebijakan publik adalah apa yang dikatakan dan dilakukan pemerintah, mencakup tujuan-tujuan, maksud program pemerintah, pelaksanaan niat dan peraturan. Bahkan apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan juga disebut sebuah kebijakan menurut R. Dye.

Sebuah kebijakan disusun melibatkan aktor sebagai penyusun. Kekuatan aktor banyak ditentukan oleh faktor-faktor, salah satu di antaranya adalah organisir masalah atau persoalan yang kemudian dirumuskan menjadi keputusan yang akan menjadi perintah bagi publik. Kebijakan yang berasal dari bawah *bottom up* organisasi masalah menjadi lebih mudah karena persoalan yang dihadapi nyata dan sesuai dengan pertimbangan yang kasuistik. Sudah tentu akan memenuhi kebutuhan masyarakat di mana implementasi diterapkan.

Pada skala kecil, kebijakan lebih mudah diimplementasikan karena pihak yang mengambil keputusan sekaligus menjadi pelaksana keputusan pada tingkat implementasi tersebut. Selain itu kelompok-kelompok berkepentingan relatif tidak banyak dan kemungkinan konflik kepentingan kecil.

Biasanya, aktor dan implementator dari sebuah kebijakan tidak membedakan jenis kelamin. Tetapi, pada praktiknya perbedaan porsi tetap ada. Secara sosial, pembagian tugas antara lelaki dan perempuan, antara anak-anak dan orang dewasa, muncul dengan sendirinya.

Di Indonesia, walaupun dalam porsi (takaran) yang berbeda dengan laki-laki, perempuan memiliki porsi tersendiri dalam hal kebijakan publik. Dalam berbagai sektor perempuan memiliki peran, bahkan porsi keterlibatan perempuan dalam berbagai hal diatur jelas dalam Undang-Undang. Misal keterlibatan perempuan 30% di parlemen diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Walaupun realnya hal ini belum tercapai. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan sangat penting agar keterwakilan suara perempuan dapat terakomodir. Ini penting agar tidak adanya diskriminasi.

Untuk mempengaruhi aktor pengambil kebijakan, perempuan perlu melibatkan diri dalam wadah yang dapat menyalurkan gagasan (pemikiran) perempuan. Melalui organisasi-organisasi formal maupun non formal, perempuan dapat mengambil peran. Dengan adanya keterlibatan dalam berbagai sektor, keterwakilan pendapat perempuan akan terakomodir. Jika di zaman dahulu paguyuban mampu menggerakkan warga dalam berbagai persatuan baik itu seni ataupun agama, di masa kini organisasi-organisasi dapat menjadi motor pergerakan warga untuk masuk dalam sektor yang lebih formal. Melalui Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) misalnya. Melalui PKK di berbagai tingkat. Tingkat terdasar adalah PKK desa. Partisipasi perempuan melalui PKK desa dalam berbagai hal dirasa mampu mempengaruhi kebijakan setingkat desa. Dengan aktif melalui PKK perempuan-perempuan desa yang berlatar belakang pendidikan beragam, bahkan ada yang tidak mengenyam bangku pendidikan terbukti dapat menyalurkan ide dan kreativitas sehingga hal itu menjadi pemikiran pengambil kebijakan di tingkat desa.

HASIL PENELITIAN KEPALA DESA PARMi

Jangkang pernah dipimpin oleh seorang kepala desa perempuan. Parmi. Parmi terpilih menjadi kepala desa melalui proses pemilihan oleh masyarakat tahun 1993. Sosok yang berpendidikan sekolah rakyat (SR) menjadi kepala desa selama 10 tahun, atau dua periode hingga 2003.

Pada masa kepemimpinan Parmi, desa Jangkang I mendapatkan beberapa penghargaan. Salah satunya diantaranya, menjuarai lomba desa tingkat kabupaten.

Kegiatan pemerintah kecamatan banyak dilaksanakan di Jangkang 1 karena kemampuan jaringan Parmi. Sementara kegiatan kabupaten jarang dilakukan karena jarak yang jauh dengan pusat pemerintahan, kala itu di Mempawah. Jalan darat seperti yang terlihat hari ini belum ada. Jangkang ke Jangkang I, ke Sungai Bulan dari Rasau Jaya saja masih berupa jalan tanah, dan berlumpur.

Parmi juga berhasil membangun kepercayaan diri perempuan di desanya. Kehadirannya di pentas publik memberi inspirasi kepada perempuan Jawa di sana bahwa perempuan tidak hanya urusan sumur, dapur dan kasur. Perempuan juga dapat menjadi pemimpin.

Alhasil, semangat untuk maju dan berkiprah di kalangan perempuan Jangkang I tinggi. Beberapa orang melanjutkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi. Anak Parmi salah satu diantaranya melanjutkan sekolahnya pada akademi kebidanan, dan sekarang menjadi salah satu penggerak perempuan Jangkang I.

PKK JANGKANG 1

Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga (PKK) merupakan organisasi pemberdayaan perempuan yang mengakar rumput hingga tingkat terdasar, desa. Organisasi ini didirikan tahun 1972 di seluruh Indonesia, mengemban tugas pemberdayaan keluarga melalui 10 program pokok PKK.

Kehadiran organisasi ini memberi ruang kepada ibu-ibu, kaum perempuan, untuk berpartisipasi di ruang publik. Perempuan mendapat media untuk tampil, khususnya berkaitan dengan bidang kelompok kerjanya (Pokja).

Di Jangkang, kehadiran PKK jelas sangat penting mendorong peran perempuan di ruang publik. PKK Jangkang I mulai serius bergerak aktif sejak 2018, saat momen terpilihnya Jangkang 1 sebagai perwakilan Kecamatan Kubu dalam lomba desa tingkat kabupaten. Ketua PKK Jangkang 1 Nurul Karomah, sekretaris Nurhayati, bendahara Sopiya, Pokja 1 Yuli Wardani, pokja 2 Sri Rahayu, pokja 3 Ngaisah, pokja 4 Mudrikah.

Sejak itu, PKK Desa Jangkang 1 mendapat berbagai point plus di tingkat Kabupaten Kubu Raya yang kemudian hal tersebut dapat mempengaruhi kebijakan desanya di tahun selanjutnya. Kebijakan penambahan porsi pelatihan kapasitas perempuan melalui pengolahan hasil bumi unggulan Jangkang 1 misalnya, yang kemudian dituangkan dalam APBDes.

Beberapa keberhasilan yang dicapai perempuan di Desa Jangkang 1 tidak lepas dari keberhasilan kepemimpinan (leadership) seorang istri kepala desa sebagai ketua tim penggerak PKK desa dalam menggerakkan seluruh anggota PKK Desa Jangkang 1 dan seluruh warga desanya tanpa terkecuali.

Warga yang tergabung dalam PKK (anggota PKK) desa sebagai gerbong penggerak yang membantu ketua tim penggerak dalam menjalankan seluruh program pokok PKK. 10 program pokok PKK diantaranya; penghayatan dan pengamalan pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tatalaksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkopras, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat. Ke sepuluh program pokok PKK tersebut merupakan hal-hal mendasar dalam organisasi terkecil yaitu keluarga. Karena titik tolak program-program pemberdayaan adalah keluarga. Dari organisasi terkecil ini, perempuan juga memiliki peran (keterlibatan) dalam porsi yang cukup besar sebelum masuk dalam ruang publik.

Ke sepuluh program pokok PKK tersebut juga nyatanya mendongkrak Indeks Desa Membangun (IDM) desa itu sendiri. Baik dari Indeks Ketahanan Sosial (IKS) ataupun Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE). Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial); Dimensi

Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan); Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan); dan Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi). Kesemua kriteria dalam Indeks Ketahanan Sosial tersebut tercover dengan berjalannya program-program pokok PKK.

Dalam program pengamalan penghayatan dan pengamalan pancasila misalnya. Program turunannya adalah adanya kegiatan keagamaan rutin melalui kelompok-kelompok pengajian, shalawatan dan hadrah (rebana). Tidak hanya itu, program lainnya sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan juga terdapat dalam program pokok PKK. Kegiatan yang menopang sandang, pelatihan-pelatihan menjahit. Mesin jahit difasilitasi (pengadaan) penganggaran desa.

Kegiatan bercocok tanam, timun, terong, kacang, cabai, ubi rambat, ubi kayu, jahe, kencur, kunyit, kacang hijau, jagung manis dan beberapa jenis tanaman lainnya. Tanaman-tanaman tersebut memanfaatkan lahan kebun PKK maupun di pekarangan rumah masing-masing warga dengan menanam menggunakan polibag dan kebun-kebun yang mayoritas warga Jangkang 1 berprofesi sebagai petani. Dalam kegiatan kesehatan, posyandu Cendrawasih aktif menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik balita, lansia maupun ibu hamil.

Di atas kertas ke sepuluh program tersebut menjadi pengikat bahwa organisasi pemberdayaan perempuan dapat memberikan kontribusi dan pengaruh penting dalam kebijakan dan ruang publik. Beberapa program pelatihan pemberdayaan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), untuk mengakomodir, mengali, meningkatkan, mengembangkan potensi perempuan desa. Di antaranya pelatihan menjahit, pelatihan mengolah produk unggulan desa, dan beberapa bentuk pelatihan lainnya.

PEREMPUAN JANGKANG 1 DAN PERANNYA

Perempuan-perempuan Jangkang 1, melakukan perannya sesuai kapasitas masing-masing, selain tetap pada peran sebagai petani. Mayoritas perempuan Jangkang 1, apapun profesinya akan tetapi tetap bercocok tanam (tani) dengan memaksimalkan potensi pertanian Jangkang 1. Inilah yang membuat Jangkang I menjadi sentra produksi pertanian Kubu Raya.

Selain Ibu kepala desa yang menjadi penggerak, istri-istri perangkat desa lainnya juga diakomodir dengan baik di Jangkang 1. Seluruh istri perangkat desa secara otomatis menduduki posisi masing-masing di struktur PKK desa sesuai jabatan suami. Ini dilakukan, agar istri-istri perangkat desa dapat mendukung penuh tugas dan peran suami sebagai perangkat desa. Dapat bersama-sama membangun desa, dan lebih mudah dalam menggerakkannya.

Selain aktif di PKK desa, istri-istri perangkat desa juga aktif dalam kegiatan majelis taklim desa Jangkang 1. Istri-istri perangkat desa yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana menjadi tenaga pendidik di sekolah, juga Taman Pendidikan Al-Qur'an. Tenaga medis (bidan desa) setempat juga adalah perempuan asli Jangkang 1 yang berlatar belakang anak mantan kepala desa perempuan di tahun 1993.

Beberapa kebijakan yang diambil di Jangkang 1 dilatarbelakangi kaum perempuan. Kebijakan Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) misalnya yang kemudian bergairah setelah melihat kreativitas dan produktifitas perempuan melalui PKK desa. Beberapa pengembangan

produk olahan unggulan desa misalnya, yang kemudian disalurkan melalui BumDes. Dengan aktifnya pendamping desa yang ditugaskan untuk mendampingi desa-desa di Kecamatan Kubu, masyarakat menjadi lebih terarah dalam bergerak.

Dalam beberapa keberhasilan yang diraih Jangkang 1, peran pemimpin sangatlah vital. Satu waktu saat masa transisi, periode pergantian kepala desa dan digantikan sempat ada kekosongan figur (pemimpin) karena tampuk kepemimpinan digantikan oleh PJ dan istri PJ tidak berperan selama masa transisi tersebut. Sementara pada waktu yang sama, momen lomba PKK KKBPK Kesehatan sudah di ambang pintu.

Tetapi kemudian, dalam perkembangan selanjutnya, figur baru muncul dan bergerak lagi. Masalah yang muncul dapat diselesaikan, dan perempuan di sana menjadi kembali “hidup”.

DISKUSI

Aktifnya pergerakan perempuan bahkan di tingkat desa Jangkang 1 Kubu Raya, membuktikan tidak adanya batasan perempuan dalam berpartisipasi mengembangkan potensi yang dimilikinya. Disadari atau tidak, hal ini nyatanya memberikan pengaruh pada kebijakan publik. Beberapa anggaran pemberdayaan perempuan diberikan porsi lebih dengan harapan sekecil apapun potensi perempuan dapat dimaksimalkan untuk ketahanan keluarga terutama, ruang publik umumnya. Hal ini juga untuk mendorong semangat masyarakat dalam menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan kemampuan yang dimiliki.

Hal-hal positif yang dapat dilihat dari program pemberdayaan ini adalah, perempuan dapat menerapkan manajemen kepemimpinan yang selama ini hanya diterapkan dalam keluarga, kemudian diterapkan dalam ruang publik. Memfasilitasi banyak perempuan lain, menghadapi berbagai karakter perempuan yang tidak jarang menimbulkan konflik, dan mengambil berbagai keputusan penting di dalamnya. Kondisi di lapangan ini sangat berdampak positif bagi perempuan. Karena peran perempuan di ruang publik kini lebih kepada penggalan potensi yang dimiliki sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi kebijakan publik.

Apa yang terjadi di Jangkang 1, menunjukkan bahwa jenis kelamin bukan faktor penghambat keterlibatan perempuan dalam sektor publik dan partisipasi mereka dalam kebijakan publik. Merujuk pada Solahudin (2010) perempuan Jangkang 1 sudah memainkan peran dalam kebijakan publik dan berpartisipasi dalam kegiatan publik melalui profil kepala desa Parmi. Sebagai kepala desa, Parmi memperlihatkan bahwa perempuan hadir di pentas publik dan membuat kebijakan-kebijakan publik.

Meskipun jabatan Parmi sudah berakhir, namun, peran perempuan tidak surut. Kehadiran organisasi PKK Desa Jangkang I merupakan wadah yang mengorganisir aktor-aktor selanjutnya dalam kebijakan publik sekaligus bagian dari sasaran kebijakan. Dapat dikatakan, kebijakan yang diambil bersifat bottom up, dari kaum perempuan oleh kaum perempuan dan untuk kaum perempuan.

Ini, juga berarti hambatan partisipasi perempuan dalam ruang publik yang ditemukan oleh Kusumayanti (2019) tidak dijumpai di sini. Perbedaan ruang sosial di kota dan desa bisa dianggap sebagai perbedaan kasuistik masalah ini. Namun, dibandingkan di tempat lain yang juga berkarakter lingkungan pedesaan, atau tempat lain yang terikat oleh adat (terutama orang Jawa yang njava yang memiliki filsafat sumur, dapur dan kasur), perempuan Jangkang 1 telah keluar dari kungkungan subordinat dari lelaki.

KESIMPULAN

Perempuan Jangkang 1 Kubu Raya, Kalimantan Barat, memperlihatkan diri sebagai aktor-aktor dalam ruang publik dan kebijakan publik. Meskipun mereka orang Jawa transmigrasi dari Jawa Tengah tahun 1983 yang cenderung terikat pada filosofi segi tiga dapur, sumur dan kasur, namun, mereka menjadi pemimpin masyarakat secara formal (sebagai kepala desa) dan menjadi aktor yang terlibat dalam pengambilan kebijakan publik.

PKK Desa Jangkang 1 telah menjadi organisasi atau wadah yang mengorganisir peran perempuan. Program Pokok PKK menjadi pintu masuk untuk mendorong partisipasi mereka lebih aktif baik pada tingkat perencanaan kebijakan maupun pelaksanaannya.

Justru itu, apa yang terjadi di Jangkang 1, Kubu Raya ini menunjukkan bahwa perempuan yang selama ini dianggap subordinat dari lelaki, tidak terjadi di sini. Perempuan malah lebih berperan dan aktif..

DAFTAR PUSTAKA

- Amar, S. (2017). Perjuangan Gender dalam Kajian Sejarah Wanita Indonesia pada Abad XIX. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan*, 1(2).
- Fadilah, S. (2018). Kesetaraan Gender: Fenomena Pergeseran Peran Ekonomi Wanita dari Tulang Rusuk menjadi Tulang Punggung. *Mitra Gender (Jurnal Gender dan Anak)*, 1(1), 18-26.
- Kusdiana, A. (2011). Emansipasi Wanita, Kesadaran Nasional, dan Kesetaraan Gender di Pentas Sejarah Nasional Indonesia. *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah*, 1(1), 18-31.
- Kusumayanti (2019). Dilema Ruang Perempuan dalam Keluarga dan Publik; Studi Kasus Peran Perempuan di Kecamatan Pontianak Utara. *Raheema* 6 (2): 125-142.
- Maulana, D. (2017). Partisipasi Politik Perempuan dan Kebijakan Publik di Provinsi Banten. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2).
- Mustikawati, C. (2013). Emansipasi Wanita Dalam Pemikiran RA Kartini (Studi Hermeneutika Makna Emansipasi Wanita Dalam Buku *Habis Gelap Terbitlah Terang*) (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- NL, B. F. (2019). Representasi Perempuan dalam Politik (Studi tentang Komunikasi Politik Perempuan Muslim dalam Legislatif Kota Salatiga Periode 2014-2019) (Doctoral dissertation, IAIN SALATIGA).
- Rahman, L., Noerdin, E., Aripurnama, S., & Yuningsih, R. L. (2005). Representasi Perempuan Dalam Kebijakan Publik Di Era Otonomi Daerah. Women Research Institute.
- Sagala, L. (2018). Keterwakilan Perempuan dalam Keanggotaan Legislatif Daerah Periode 2014-2019 Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Doctoral dissertation, IPDN).
- Solahudin Kusumanegara (2010), Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gava Media
- Watie, E. D. S. (2016). Representasi Wanita Dalam Media Massa Masa Kini. *Jurnal The Messenger*, 2(2), 1-10.

- Wina, P., & Habsari, N. T. (2017). Peran Perempuan Dayak Kanayatn Dalam Tradisi Upacara Naik Dango (Studi Di Desa Padang Pio Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak Kalimantan Barat). *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, 7(01).
- Yeni, S. E. (2017). Perempuan Berdaya Tawar: Tantangan dan Peluang Partisipasi Politik Perempuan. *AGENDA: Jurnal Analisis Gender dan Agama*, 1(1).